

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2022**

INFORMASI BERKALA

NO.	INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFROMASI	PENERBIT INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN / RETENSI WAKTU
1.	Profil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Profil, Visi, Misi dan Struktur Organisasi	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Organisasi dan Humas	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
2.	Organisasi dan Tata kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Ruang Lingkup dan Tupoksi Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sesuai dengan PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Organisasi dan Humas	Softcopy	Jakarta, 2018	Selama Masih berlaku
3.	Struktur Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagan Struktur Organisasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Kepegawaian	Softcopy	Jakarta, 2022	Selama Masih berlaku
4.	Profil Pejabat Di Lingkungan Direktorat	Data Diri Pejabat Eselon I dan Eselon II Kantor Pusat Di Lingkungan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal	Bagian Kepegawaian	Softcopy	Jakarta, 2022	Selama Masih berlaku

	Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Perhubungan Laut				
5.	Pegawai Wajib Laporkan LHKPN Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Lembar Berita Negara yang telah Di Verifikasi Oleh KPK Kepada Pejabat Eselon I dan II Kantor Pusat dan Tanda Terima LHKPN Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Masing-Masing Direktorat	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
6.	Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Daftar Nama Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Alamat, No telepon, Fax dan Email Kantor	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Kepegawaian	Softcopy	Jakarta, 2022	Selama Masih berlaku
7.	Agenda Pimpinan	Daftar Agenda Kegiatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Umum dan Perlengkapan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
8.	Rencana Strategis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Perencanaan	Softcopy	Jakarta, 2020	5 Tahun
9.	Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Satuan Tugas SPIP Di	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal	Bagian Perencanaan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun

	Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Satuan Tugas SPIP Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022	Perhubungan Laut				
10.	Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis	Telah Ditetapkan Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.809/DJPL/2020 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2022	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
11.	Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP - DJPL 190 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.998/DJPL/2021 tentang Penetapan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun

		Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2022					
12.	Penetapan Penempatan Kapal Perintis	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP - DJPL 96 Tahun 2022 tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2022	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
13.	Kegiatan Contac Center Tier 2 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. DJPL 206 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Contac Center Tier 2 Di Lingkungan Direktorat Jenderal perhubungan Laut Tahun Anggaran 2022	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Umum dan Perlengkapan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
14.	Bagan Pemisah Alur / Traffic Separation Schemes (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok	Surat Keputusan Menteri Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute Di Selat Lombok dan Surat Keputusan Menteri Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kenavigasian	Softcopy	Jakarta, 2020	Selama masih berlaku

		Sistem Rute Di Selat Sunda					
15	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Shipping Instructions dan Pemesanan Ruang Muat Kapal Dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut	Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/72/14/DJPL-18 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Shipping Instructions dan Pemesanan Ruang Muat Kapal Dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Softcopy	Jakarta, 2018	Selama masih berlaku
16	Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Daftar Dokumen Standar Pelayanan dan Makumat Pelayanan Pada 296 UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Organisasi dan Humas	Softcopy	Jakarta, 2022	Selama masih berlaku
17	Tarif Sementara Angkutan Barang Di Laut Untuk Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)	Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP - DJPL 382 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP – DJPL 31	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Softcopy	Jakarta, 2021	Selama masih berlaku

		Tahun 2022 tentang Tarif Sementara Angkutan Barang Di Laut Untuk Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation) Tahun 2022					
18	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Daftar UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang sudah membentuk UPG	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Kepegawaian	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
19.	Sekolah/Lembaga Diklat yang Mendapatkan Approval Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Daftar Sekolah / Lembaga Diklat yang Telah Mendapatkan Approval Dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
20.	Rumah Sakit yang Dapat Melakukan Pemeriksaan Pelaut	Daftar Rumah Sakit yang Dapat Melakukan Pemeriksaan Pelaut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
21.	Pelabuhan / UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Melakukan Pendaftaran Kapal	Daftar Pelabuhan / UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Melakukan Pendaftaran Kapal	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun

22.	Pelabuhan / UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Menerbitkan Buku Pelaut	Daftar Pelabuhan / UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Dapat Menerbitkan Buku Pelaut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
23.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alur Pelayaran, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya	Daftar Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur Pelayaran, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kenavigasian	Softcopy	Jakarta, 2021	1 Tahun
24.	Fasilitas Pelabuhan Di Indonesia yang Menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code	Daftar Fasilitas Pelabuhan Di Indonesia yang Menerapkan ISPS Code	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
25.	Kapal yang Mendapatkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Di Indonesia	Daftar Kapal yang Mendapatkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Di Indonesia	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
26.	Penerapan Inapornet Di Pelabuhan	Daftar Pelabuhan Yang Menerapkan Inapornet	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun

27.	Kapal yang Terdaftar Di Indonesia	Daftar Jumlah Kapal yang Terdaftar Di Indonesia	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	Hardcopy dan Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
28.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Perencanaan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
29.	Laporan Tahunan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Dokumen Laporan Tahunan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Umum dan Perlengkapan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
30.	DIPA Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Surat Pengesahan DIPA Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pusat	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Keuangan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
31.	RKA-KL Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rincian Kertas Kerja Satker / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Awal Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pusat	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Keuangan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun

32.	Laporan Keuangan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pusat	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Keuangan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
33.	Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Perencanaan	Softcopy	Jakarta, 2021	1 Tahun
34.	Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Laporan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pusat Tahun 2021	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Organisasi dan Humas	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
35.	Susunan PPID Pelaksana Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Susunan PPID Pelaksana Kantor Pusat dan UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sesuai Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.562/DJPL/2019 tentang Susunan PPID Pelaksana Di Lingkungan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Organisasi dan Humas	Softcopy	Jakarta, 2019	Selama masih berlaku

		Direktorat Jenderal Perhubungan Laut					
36.	Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2022	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Organisasi dan Humas	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
37.	Pembentukan PPID Pelaksana UPT Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Daftar PPID Pelaksana UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang Sudah Membentuk PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Organisasi dan Humas	Softcopy	Jakarta, 2019	Selama masih berlaku
38.	Permohonan informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tata Cara Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Organisasi dan Humas	Softcopy	Jakarta	Selama masih berlaku
39.	Kegiatan Test Bed E-Pilotage	Daftar Distrik Navigasi Yang Telah Melaksanakan Kegiatan Test Bed E-Pilotage	Direktorat Kenavigasian	Softcopy	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
40.	Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perhubungan Laut yang telah disahkan dan ditetapkan	Daftar Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Perhubungan Laut yang Telah Ditetapkan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri	Softcopy	Jakarta, 2022	Selama masih berlaku

INFORMASI SERTA MERTA

1	Penerbitan Surat Edaran terkait Penyelenggaraan Angkutan Lebaran/Angkutan Natal dan Tahun Baru	Instruksi / Himbauan terkait Penyelenggaraan Angkutan Lebaran/Angkutan Natal dan Tahun Baru Kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
2	Maklumat Pelayaran	Berita dan Himbauan Kewaspadaan terhadap Cuaca Ekstrem di Perairan Indonesia	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun

INFORMASI SETIAP SAAT

1.	Layanan Perizinan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Prosedur dan Persyaratan Perizinan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat	Softcopy	Jakarta	Selama masih berlaku
2.	Konvensi International yang Telah Diratifikasi Di Indonesia	Daftar Konvensi International Bidang Maritim Yang Telah Diratifikasi	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
3.	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Program dan Kegiatan, Ruang Lingkup, Penanggungjawab, dan Jadwal Kerjasama	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal	Direktorat dan Bagian	Softcopy	Jakarta	Selama masih berlaku

			Perhubungan Laut				
4.	Kegiatan Kerjasama Luar Negeri	Daftar Penyelenggaraan Pertemuan / Sidang / Forum Bilateral, Regional dan Sub Regional, Multilateral dan IMO Tahun 2021	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
5.	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN)	Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Umum dan Perlengkapan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
6.	Jenis dan Tarif PNBP	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Keuangan	Softcopy	Jakarta, 2016	Selama masih berlaku
7.	Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Jumlah Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pusat	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Kepegawaian	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
8.	Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat	Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal	Bagian Kepegawaian	Softcopy	Jakarta, 2016	Selama masih berlaku

	Jenderal Perhubungan Laut	Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Perhubungan Laut				
9.	Perusahaan yang Memiliki Surat izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Perusahaan yang Memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)	Daftar Perusahaan yang Memiliki Surat izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Perusahaan yang Memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
10.	Armada Niaga Nasional	Jumlah Armada Niaga Nasional Berbendera Indonesia	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
11.	Pelabuhan Di Indonesia	Jumlah Pelabuhan Di Indonesia	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kepelabuhanan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
12.	Perairan Pandu Di Indonesia	Daftar Perairan Pandu Di Indonesia	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kepelabuhanan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun

13.	Pelaut Di Indonesia	Jumlah Pelaut Indonesia	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Perkapalan dan Kapelautan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
14.	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Daftar Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kenavigasian	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
15.	Stasiun Radio Pantai (SROP)	Daftar Stasiun Radio Pantai (SROP)	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kenavigasian	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
16.	Kapal Negara Kenavigasian	Daftar Armada Kapal Kenavigasian	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kenavigasian	Softcopy	Jakarta, 2021	1 Tahun
17.	Kapal Patroli KPLP	Daftar Kapal Patroli KPLP	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
18.	Tersus / TUKS / BUP yang Telah Memenuhi Persyaratan Penanggulangan Pencemaran	Daftar Tersus/TUKS/BUP yang Telah Memenuhi Persyaratan Penanggulangan Pencemaran	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun

19.	Perusahaan Pekerjaan Bawah Air / Salvage	Daftar Perusahaan Pekerjaan Bawah Air / Salvage	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
20.	Keagenan Resmi Awak Kapal	Daftar Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
21.	Kegiatan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Kasus-Kasus Kepegawaian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Kasus-Kasus Kepegawaian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Kepegawaian	Softcopy	Jakarta, 2022	1 Tahun
22.	Stasiun Vessel Traffic Services (VTS)	Daftar Stasiun Vessel Traffic Services (VTS)	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kenavigasian	Softcopy	Jakarta, 2022	Selama masih berlaku
23.	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan	Daftar Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kepelabuhanan	Softcopy	Jakarta, 2022	Selama masih berlaku

24.	Rancangan Peraturan Menteri Bidang Perhubungan Laut	Daftar Posisi Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Bidang Perhubungan Laut	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri	Softcopy	Jakarta, 2022	Selama masih berlaku
25.	Aplikasi Layanan Publik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Daftar Aplikasi Layanan Publik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pusat	PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Bagian dan Direktorat	Softcopy	Jakarta	Selama masih berlaku

INFORMASI DIKECUALIKAN

1.	Rincian Satuan Harga, Penawaran, Nomor Rekening dan Alamat yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang / Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)	<p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf a :Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Pasal 17 huruf h angka 3 : . Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang 	Sampai Ada Persetujuan dari Pihak Ketiga (Perusahaan) yang Bersangkutan	
----	---	--	---	--

2.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pelaut	<p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 2 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang 	Sampai Ada Persetujuan dari Pelaut yang Bersangkutan
3.	Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf a : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Pasal 17 huruf h : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 3. Pasal 17 huruf i : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan 	Sampai Ada Persetujuan dari PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

4.	Informasi Terkait Rincian Pemeriksaan Tindak Pidana Pelayaran	<p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="510 300 1106 906">1. Pasal 17 huruf a angka 1 s.d. 5 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum<li data-bbox="510 943 1106 1347">2. Pasal 17 huruf h angka 1, 4 dan 5 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	
----	---	---	--

		3. Pasal 17 huruf i : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	
5.	Data Kepemilikan Senjata Api Dinas Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 huruf c angka 3 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu : jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya 2. Pasal 17 huruf h angka 1, 4 dan 5 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	Sampai Ada Terbitnya Peraturan yang Memperbolehkan Data Kepemilikan Senjata Api Dinas Dapat Diumumkan